

TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

2019

PER BPHMIGAS NO.16, BN 2019/NO.877, 6 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PT INDOGAS KRIYA DWIGUNA UNTUK RUAS TRANSMISI TA#3 LAPINDO GAS *PLANT* DI KALIDAWIR SAMPAI DENGAN *MOTHER STATION* PT BASKARA ASRI GHAS DI GEBANG KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

ABSTRAK :

- Untuk mengatur ketentuan tarif gas bumi melalui pipa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dan dalam Pasal 9 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009.
- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2001; PP No. 67 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2004; KEPRES No. 86 Tahun 2002; PER BPHMIGAS No. 8 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang dioperasikan oleh PT Indogas Kriya Dwiguna selaku *Transporter* untuk Ruas Transmisi TA#3 Lapindo Gas *Plant* di Kalidawir sampai dengan *Mother Station* PT Baskara Asri Ghas di Gebang Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebesar USD 0.271/MSCF (*not koma dua tujuh satu dollar Amerika Serikat per seribu standar kaki kubik*).

CATATAN :

- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Agustus 2019.
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa antara *Transporter* dengan *Shipper* yang telah disepakati sebelum Peraturan Badan ini ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan tarif berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Persetujuan Upload JDIH (KSBH1):